

DAMPAK DEMOKRASI TERHADAP PERDAGANGAN DI NEGARA-NEGARA BERPENDAPATAN MENENGAH DAN TINGGI ASIA

(Impacts of Democracy on Trade Activity in Asia's Middle and High Income Countries)

Nathania Riris Michico Tambunan

Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, Universitas Indonesia
Jl. Salemba Raya No. 4, Jakarta Pusat
Email: michicotambunan@gmail.com

Naskah diterima: 13 Januari 2020

Naskah direvisi: 1 Juni 2020

Naskah diterbitkan: 30 Juni 2020

Abstract

A democratic system is a way as the basis for supporting the trade process among countries. Increased international trade can generate economic growth. But some parties claim that democracy actually would hinder or even threatens the trade flows. That dynamic situation is increasingly apparent in middle and high-income countries. This study aims to determine whether democracy impacts on trade, especially in Asia. Using the Gravity Model, this study focuses on 11 countries divided by their income from period 2009 to 2018. The high-income countries chosen in this study are Japan, Singapore, South Korea, and Brunei Darussalam, and middle-income countries are China, Indonesia, Malaysia, Thailand, the Philippines, Pakistan, and India. Using the panel data regression method, the results of this study states that democracy in the Asia Countries affected trade significantly. It was also found that trade in high-income countries was not affected by democracy, while trade in low-income countries was strongly influenced by democracy.
Keywords: democracy, trade, Gravity Model, middle income countries, high income countries

Abstrak

Sistem demokrasi menjadi salah satu jalan untuk mendukung terjadinya perdagangan antara negara satu dengan lainnya. Peningkatan perdagangan internasional berkontribusi penting terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, beberapa pihak mengklaim bahwa demokrasi dianggap menghambat atau bahkan dapat mengancam suatu aliran perdagangan. Dinamika dari situasi tersebut semakin terlihat jelas ketika melibatkan negara-negara berpendapatan menengah dan tinggi. Studi ini bertujuan untuk mengetahui apakah demokrasi berdampak pada perdagangan, khususnya di Asia. Dengan menggunakan Model Gravitasi, studi ini difokuskan pada 11 negara yang dibagi berdasarkan pendapatan dari tahun 2009 hingga 2018. Negara berpendapatan tinggi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Jepang, Singapura, Korea Selatan, dan Brunei Darussalam, dan negara berpendapatan menengah adalah Tiongkok, Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Pakistan, dan India. Berdasarkan pendekatan melalui metode regresi data panel, hasil penelitian ini menemukan bahwa interaksi antara demokrasi dan negara-negara di Asia memengaruhi perdagangan secara signifikan. Namun, ditemukan pula bahwa perdagangan di negara-negara berpenghasilan tinggi tidak terpengaruh oleh demokrasi, sedangkan perdagangan di negara-negara berpenghasilan rendah sangat dipengaruhi oleh demokrasi.

Kata kunci: demokrasi, perdagangan, Model Gravitasi, negara berpendapatan menengah, negara berpendapatan tinggi

PENDAHULUAN

Hubungan demokrasi dan kaitannya dengan perdagangan menjadi tema penelitian yang menarik perhatian para ekonom, pakar politik, dan kaum intelektual sejak puluhan tahun lalu. Peran sistem politik di suatu negara, baik demokrasi maupun autokrasi memiliki implikasi penting untuk semua keputusan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah (Balamatsias, 2018). Menurut Barro (1996), interaksi antara perkembangan ekonomi dan demokrasi sangat berpengaruh terhadap sebuah negara. Dengan diadopsinya demokrasi, diharapkan sistem politik itu bisa mendorong percepatan kemajuan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Demokrasi, atau seberapa besar pemerintah bergantung pada rakyat agar tetap berkuasa, dapat menentukan bagaimana kebijakan perdagangan diputuskan, yang pada akhirnya akan memengaruhi perdagangan internasional (Maulana & Hastiadi, 2019). Beberapa

ahli politik dan ekonom bahkan meyakini, demokrasi bisa mendorong dan berpengaruh signifikan pada perdagangan, terutama perdagangan internasional (Barro, 1996; Rodrik, 1999). Namun tidak sedikit pula yang menyebut perdagangan dan demokrasi tidak berkaitan, bahkan terjadi ketidaksinkronan antara satu dengan yang lain. Sedangkan yang lainnya berpendapat bahwa demokrasi sejatinya berkorelasi, meskipun lemah, dengan perdagangan. Salah satu yang memicu kemajuan ekonomi adalah perdagangan, yang menjadi salah satu sektor penting yang mendorong perekonomian sebuah negara. Sistem demokrasi menjadi sebuah landasan utama bagi pemerintahan agar dapat berjalan dengan baik sehingga membuka wadah yang komprehensif bagi aktivitas perekonomian (Barro, 1996). Menurut Seymour Martin Lipset (Stepan & Linz, 2013) prasyarat terwujudnya demokrasi adalah pertumbuhan ekonomi yang baik pada suatu negara.

Dalam analisis Lipset, negara kelas menengah muncul sebagai kekuatan utama pro-demokrasi, dan kelas ini bertambah besar seiring dengan perkembangan sosial ekonomi (Rueschemeyer et al., 1992).

Demokrasi menjadi tren global, dan negara-negara di seluruh dunia menjadi lebih demokratis untuk membuka jalan bagi berkembangnya perdagangan. Tren sentral demokrasi dan perdagangan ini ditandai dengan adanya pertukaran yang semakin intens antara orang, barang, informasi, dan uang melintasi batas negara. Fenomena ini umumnya disebut sebagai globalisasi ekonomi (Friedman, 1999). Przeworski et al. (2000) memberikan argumen tentang hubungan antara demokratisasi dan reformasi ekonomi seperti liberalisasi perdagangan. Negara-negara yang menjalankan demokratisasi akan mengejar kebijakan reformasi ekonomi dan kemajuan perdagangan dalam jangka pendek. Basis moral demokrasi itu sendiri adalah memberi kebebasan pada manusia, sehingga memberi warga tiap individu kekuatan untuk mengekspresikan pendapat dan imajinasi kreatif sambil menggunakan preferensi mereka dan, dalam melakukannya secara bersamaan untuk memerintah dan untuk diperintah. Tujuan demokrasi adalah memungkinkan warga negara untuk mengekspresikan preferensi mereka, yaitu dapat memperkuat integrasi sosial dengan memotivasi individu untuk berpartisipasi dalam proyek sosial politik di masyarakat (Polterovich & Popov, 2010).

Menurut Acemoglu et al. (2019), dampak positif demokrasi ternyata dirasakan lebih besar oleh negara-negara dengan kualitas sumber daya manusia yang tinggi. Demokrasi akan bekerja lebih baik dengan populasi yang lebih terpelajar dan modern. Kualitas sumber daya manusia yang tinggi tersebut dapat atau mampu menyelesaikan konflik yang ada di masyarakat sehingga demokrasi berjalan menjadi lebih stabil. Kono (2006) juga menjadi salah satu peneliti yang pro bahwa demokrasi dapat menurunkan hambatan perdagangan itu sendiri. Namun, ada pula yang beranggapan bahwa demokrasi menjadi hambatan yang sangat kuat pada pertumbuhan ekonomi bagi negara-negara dengan tingkat pembangunan yang rendah (Aghion et al., 2008). Pertanyaan soal bagaimana berbagai demokrasi memengaruhi ekonomi dan perdagangan memang telah diperdebatkan sejak abad ke-17 oleh para ilmuwan, baik yang berasal dari politik, ekonom, dan sosiolog. Demokrasi dianggap baik untuk perdagangan dan investasi dan pada saatnya akan memiliki dampak tidak langsung yang positif bagi perekonomian (Kurzman et al, 2002). Dalam penelitian Milner & Mukherjee (2009) ditemukan bahwa demokrasi dapat membantu mendorong globalisasi ekonomi, namun globalisasi itu sendiri tidak memajukan demokrasi. Ilmuwan politik

menunjukkan melalui uji empiris bahwa transisi demokrasi dan tingkat demokrasi yang lebih tinggi secara positif memengaruhi perdagangan dan keterbukaan keuangan. Namun, sebagian besar peneliti menemukan bahwa keterbukaan perdagangan dan keuangan tidak secara statistik memengaruhi demokrasi atau transisi demokrasi.

Menurut para pengamat asing, demokrasi di Indonesia tumbuh dan berkembang baik setelah reformasi politik, di mana ada kebebasan dalam mendirikan partai politik dan kebebasan pers (Polterovich & Popov, 2010). Dalam perkembangannya, sistem demokrasi Indonesia juga melangkah ke pemilihan langsung presiden, gubernur, bupati hingga wali kota, bahkan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pilkada relatif tinggi. Indonesia juga dianggap menjadi salah satu contoh negara dengan sistem demokrasi yang baik di kawasan *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) dan juga negara yang mayoritas Muslim, sebab Islam dan non-Muslim bisa berjalan berdampingan (Budiman, 2006). Indonesia, menurut pakar, merupakan negara yang lebih baik dari Singapura dan Malaysia, bahkan lebih baik dari Mesir dan Turki dalam menerapkan sistem demokrasi (Basri et al., 2013; Hairi, 2016; Puspa, 2019). Sebagai negara kepulauan dengan sekitar 17.000 pulau, Indonesia mampu melewati masa krisis ekonomi-politik tahun 1998 (Basri et al., 2013).

Sejarah masa lalu yang terjadi di negara-negara Barat menunjukkan, sistem demokrasi menjadi dasar untuk mendorong kemajuan ekonomi. Hasilnya, demokrasi membawa dampak langsung terhadap peningkatan perdagangan, investasi, dan kesejahteraan sosial. Kemajuan ekonomi berjalan beriringan dengan kemapanan sistem pemerintahan, dalam hal ini demokrasi, dari negara yang menganutnya. Namun, sejarah Indonesia dalam demokratisasi justru menunjukkan fenomena berbeda. Sistem demokrasi yang dibangun selama lebih dari 20 tahun ternyata belum mampu membawa efek signifikan bagi kemajuan ekonomi, melalui perdagangan (Marijan, 2010). Sistem politik di Indonesia memang lebih mengarah pada sistem demokrasi modern. Hal ini terbukti dari berbagai kelembagaan politik yang menjadi pilar utama demokrasi yang sudah ada dan terbangun dengan baik, bahkan wakil rakyat, anggota parlemen, dan presiden pun dipilih secara demokratis langsung oleh rakyat (Marijan, 2010). Namun, pemerintahan demokratis ini tidak didukung dengan sistem birokrasi dan institusi publik yang bersih (Hadiz & Robinson, 2013). Sistem demokrasi di Indonesia tidak berdampak bagi kemajuan ekonomi yang signifikan dan berkelanjutan karena terbentur praktik korupsi

berkelanjutan, sehingga tidak mampu menciptakan iklim yang sehat dan kondusif bagi aktivitas bisnis, perdagangan, investasi, serta pertukaran dan lalu lintas modal domestik maupun asing (Marijan, 2010; Hadiz & Robinson, 2013).

Melihat fenomena ini, sistem demokrasi harus ditransformasi menjadi sistem tata kelola pemerintahan yang efektif demi menciptakan pemerintahan yang bersih. Demokrasi juga harus dijalankan untuk mencegah praktik korupsi di seluruh sektor, serta meningkatkan mutu pelayanan publik. *In the long term*, pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme akan menstimulasi iklim yang sehat dan kondusif bagi perdagangan, investasi, bisnis, dan pergerakan modal yang kemudian memicu kemajuan ekonomi. Dengan kata lain, pengaruh demokrasi pada perdagangan menjadi syarat penting kualitas sebuah pemerintahan; syarat ini harus diikuti prinsip dasar *good governance* yang mencakup transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan penegakan hukum. Hal-hal inilah yang disebut syarat utama berlakunya sistem demokrasi bagi kemajuan ekonomi (Lipset, 1959).

Berbeda pula dengan Tiongkok, di mana negara itu menganut sistem autokrasi dan memberlakukan regulasi sangat ketat yang dipandang tertutup atau tidak transparan. Hal yang paling mengkhawatirkan adalah soal pekekangan ekonomi dan kebebasan terkait finansial. Selain itu, sistem finansialnya juga dikontrol ketat oleh pemerintah sesuai dengan sistem politik yang berlaku. Meskipun tidak menganut sistem demokrasi, perekonomian Tiongkok justru meningkat sangat pesat, khususnya di wilayah Asia. Melihat berbagai fenomena ini, tercipta pandangan yang menyebut *free market* adalah sebuah keharusan bagi sistem demokrasi. Artinya, kekuatan pasar yang mendominasi kekuatan di luar pemerintah dianggap memberi pengaruh positif yang dibutuhkan demokratisasi. Milton Friedman, yang mengemukakan hal ini, mengatakan kebebasan ekonomi adalah syarat mutlak bagi sebuah kebebasan politik.¹ Berdasarkan penjelasan tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada belum ada studi-studi sebelumnya yang menganalisis pengaruh demokrasi terhadap perdagangan berdasarkan pendapatan suatu negara tersebut. Indonesia sendiri mengalami perjalanan panjang dalam membangun sistem pemerintahan, di mana hal itu sangat memengaruhi pertumbuhan perekonomian Indonesia, terutama kaitannya dengan aliran perdagangan dan kerja sama yang melingkupinya.

¹ Disampaikan oleh M. Chatib Basri sebagai pengantar diskusi *Freedom Institute* pada 31 Juli 2002 dalam rangka 90 tahun Milton Friedman.

Dari era Presiden Soekarno hingga Presiden Joko Widodo, nyatanya sistem politik memegang pengaruh penting dalam perkembangan perekonomian di Indonesia. Lalu, setelah lebih dari 20 tahun menganut sistem demokrasi, apakah perkembangan perdagangan internasional di Indonesia mengalami kemajuan signifikan, atau hanya sekedar 'berkembang' tanpa memberi dampak positif bagi perekonomian. Lalu apakah demokrasi selalu memiliki dampak pada perdagangan di Asia? Untuk menjelaskan ini diambil suatu hasil penelitian yang mengambil contoh salah satu negara otoriter berpendapatan menengah di Asia, yaitu Tiongkok. Dalam penelitiannya, Leal-Arcas (2011) menyebut Tiongkok merupakan tantangan besar bagi perekonomian dunia karena menjadi negara adikuasa ekonomi global baru. Agar bisa dianggap sebagai negara adikuasa ekonomi global, negara itu harus memenuhi tiga kriteria, yaitu (1) harus cukup besar untuk secara signifikan memengaruhi perekonomian dunia, (2) harus cukup dinamis untuk berkontribusi secara berarti pada pertumbuhan global, dan (3) harus cukup terbuka untuk perdagangan dan aliran modal untuk memiliki dampak besar bagi negara yaitu harus cukup (1) besar untuk secara signifikan memengaruhi perekonomian dunia, (2) dinamis untuk berkontribusi secara berarti pada pertumbuhan global, dan (3) terbuka untuk perdagangan dan aliran modal untuk memiliki dampak besar bagi negara lain.

Tiongkok memenuhi semua kriteria ini, tetapi merupakan negara adikuasa ekonomi global yang unik dalam tiga hal. *Pertama*, masih merupakan negara berpendapatan menengah dengan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita sekitar USD6.000 dalam hal daya beli. *Kedua*, Tiongkok belum menjadi negara dengan sistem demokrasi. Yang *ketiga*, Tiongkok belum menjadi ekonomi pasar menurut beberapa anggota WTO. Namun demikian, keterlibatan dan pengaruhnya dalam ekonomi, politik, dan budaya yang berkembang pesat di dunia saat ini tidak dapat disangkal. Ekspansi perdagangan Tiongkok dimulai pada tahun 1978, ketika negara itu memulai reformasi dan membuka kebijakan. Selama dekade terakhir, posisinya sebagai pemain kuat dalam perdagangan internasional sangat luar biasa. Reformasi struktural di Tiongkok, termasuk liberalisasi perdagangan, menghasilkan tingkat pertumbuhan PDB riil tahunan lebih dari 10 persen selama 4 tahun terakhir, peningkatan pendapatan per kapita, serta pengurangan kemiskinan (Leal-Arcas, 2011). Dalam prosesnya, Tiongkok menjadi pedagang terbesar di dunia. Chen & Li (2018) menemukan bahwa sistem demokrasi mengurangi hambatan perdagangan dan bisa memfasilitasi perdagangan, namun tidak serta-merta membuat ekonomi lebih tergantung pada perdagangan.

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, tujuan penelitian ini adalah menganalisis dampak demokrasi terhadap perdagangan negara di Asia berdasarkan pendapatan negara yang diteliti.

METODE

Model Gravitasi

Dasar teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model Gravitasi atau *Gravity Model*. Model Gravitasi merupakan model yang diaplikasikan dan dipakai secara statistik untuk menganalisis arus barang atau uang antara dua pihak yang terpisah jarak geografis secara bilateral. Model Gravitasi tercipta berdasarkan teori *Law of Universal Gravitation* yang dicetuskan oleh Isaac Newton pada tahun 1687. Teori Newton ini kemudian dikembangkan untuk digunakan juga pada sektor perdagangan internasional serta interaksi sosial yang terlibat di dalamnya, seperti pariwisata, migrasi, dan penanaman modal asing (Head & Mayer, 2014). Model Gravitasi menegaskan bahwa volume perdagangan bilateral merupakan fungsi dari pendapatan nasional kedua negara dan jarak antardua negara bersangkutan. Jacks et al. (2011) menunjukkan penggunaan transformasi tertentu dari Model Gravitasi untuk menyimpulkan pengaruh biaya perdagangan. Model Gravitasi sudah banyak digunakan secara luas dalam berbagai penelitian di berbagai sektor, antara lain imigrasi, *Foreign Direct Investment* (FDI), dan lainnya yang berimplikasi pada perdagangan bilateral. Model ini juga menjadi alat yang diandalkan untuk menganalisis fenomena perdagangan bebas (Suryanta, 2012). Studi empiris menggunakan model gravitasi yang digunakan dalam penelitian terkait integrasi ekonomi (*Free Trade Agreement*) terhadap arus dan pola perdagangan telah umum dilakukan hingga dekade terakhir. Model Gravitasi menggunakan beberapa variabel dasar dengan menambahkan beberapa variabel kontrol lainnya (Fakhrudin & Hastiadi, 2016).

Krugman & Obstfeld (2009) menyatakan tiga hal penting terkait Model Gravitasi, yaitu *pertama*, adanya hubungan empiris kuat antara perekonomian sebuah negara dengan *trade*, yaitu ekspor dan impor. *Kedua*, terkait logika Model Gravitasi, yaitu alasan Model Gravitasi bisa diaplikasikan. Umumnya, negara dengan perekonomian besar lebih banyak melakukan impor lantaran memiliki lebih banyak pemasukan. Negara-negara ini juga cenderung menyerap pengeluaran dari negara lain lantaran besarnya jumlah produksi, sehingga perdagangan antar dua negara menjadi lebih luas. *Ketiga*, berkaitan dengan anomali perdagangan, yaitu salah satu prinsip penggunaan Model Gravitasi; di mana model ini bisa membantu mengidentifikasi terjadinya anomali

dalam perdagangan. Jacks et al. (2008) menggunakan persamaan gravitasi untuk menemukan kerangka pemersatu yang mengakomodasi berbagai penjelasan terkait dengan perdagangan internasional. Model Gravitasi yang dikembangkan oleh Anderson & Wincoop (2003) menjelaskan tiga hal, yaitu biaya perdagangan bilateral, PDB dua negara, dan dua resistensi multilateral. Beberapa penelitian juga memaparkan bahwa Model Gravitasi bisa diperoleh melalui beberapa landasan teori ekonomi tentang perdagangan bilateral yang secara umum sudah digunakan. Bentuk Model Gravitasi yang paling sederhana bisa dilihat dalam persamaan $X_{ij} = (Y_i Y_j / D_{ij})$, di mana X_{ij} adalah ekspor dari negara i ke negara j , Y_i adalah pendapatan negara i , Y_j merupakan pendapatan negara j , dan D_{ij} merupakan jarak antara negara i dan negara j .

Metode Analisis

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel. Mengacu kepada beberapa studi dan tinjauan literatur yang sudah dilakukan sebelumnya maka *variable of interest* adalah demokrasi, dan variabel lain yang memengaruhi perdagangan di negara-negara Asia adalah GDP per kapita, GDP_{total} , *Foreign Direct Investment* (FDI), *Logistic Performance Index* (LPI), populasi, dan skor demokrasi di 11 negara yang diteliti. Negara berpendapatan tinggi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Jepang, Singapura, Korea Selatan, dan Brunei Darussalam. Sedangkan negara berpendapatan menengah yang dipilih dalam penelitian ini adalah Tiongkok, Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Pakistan, dan India. Pengelompokan ini berdasarkan data pendapatan negara yang diperoleh dari IMF dan *World Bank*. Data untuk variabel lain dalam penelitian ini diperoleh dari UNCTAD, *World Development Indicators*, *The Integrated Network of Societal Conflict Research's* (INSOCR) Polity IV Dataset, dan *LPI World Bank*.

Spesifikasi Model

Model estimasi dalam penelitian ini adalah:

$$YTRADE_{it} = \beta_0 + \beta_1 GDPCAP_{it} + \beta_2 GDPtot_{it} + \beta_3 FDI_{it} + \beta_4 POP_{it} + \beta_5 DISTANCE_{it} + \beta_6 DEMOC_{it} + \beta_7 COUNTRY_{it} + \beta_8 COUNTRY_DEMOC_{it} + e_{it} \dots\dots\dots (1)$$

Berdasarkan penelitian Maulana & Hastidati (2019), $YTRADE_{it}$ adalah volume perdagangan yaitu ekspor dan impor, di mana i menunjukkan lokasi dan t menunjukkan waktu. Lalu $GDPCAP_{it}$ menunjukkan variabel independen berupa PDB per kapita PPP negara di Asia, $GDPtot_{it}$ menunjukkan GDP total 11 negara di Asia, FDI_{it} adalah variabel *Foreign Direct*

Investment, POP_{it} adalah variabel yang menunjukkan populasi negara yang ada dalam penelitian. $DISTANCE_{it}$ adalah jarak geografis kedua negara yang dibobot dengan kepadatan populasi masing-masing negara, yang dikembangkan oleh Head & Mayer (2014). Data $DISTANCE_{it}$ atau jarak dikumpulkan dari *Logistics Performance Index* (LPI). $DEMOC_{it}$ adalah variabel demokrasi, dikumpulkan melalui skor Polity IV dari Jaringan Terpadu Riset Konflik Masyarakat (INSCR) Polity IV Dataset. $COUNTRY_{it}$ adalah variabel *dummy* dari 11 negara dalam penelitian, di mana 1 untuk negara dengan berpendapatan tinggi dan 0 untuk berpendapatan menengah. $COUNTRY_DEMOC_{it}$ adalah variabel interaksi antara variabel *country* dengan variabel demokrasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan periode waktu dari tahun 2009 hingga tahun 2018. Sumber data berasal dari *World Bank*, *UN Comtrade*, *Centre d'Etudes Prospectives et d'Informations Internationales* (CEPII), *World Trade Organization* (WTO), IMF, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Bappenas.

Studi ini menggunakan variabel PDB, PDB per kapita, populasi, jarak, FDI, indeks, demokrasi, serta variabel interaksi *Country_Democ*. Bussmann (2001) melengkapi penelitiannya terkait perdagangan internasional dengan menggunakan PDB per kapita, investasi, dan konsumsi pemerintah, sebab pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan PDB atau PDB per kapita. Tingkat kemakmuran sebuah negara lebih sering diukur dengan PDB per kapita (Heo & Kim, 2019). Keduanya bukan konsep yang sama, tetapi terkait erat sebab pembangunan ekonomi tidak mungkin terjadi tanpa pertumbuhan ekonomi. Menurut Heo & Kim (2019), perekonomian menunjukkan kecepatan akumulasi kekayaan, diukur dengan tingkat pertumbuhan PDB atau PDB per kapita. Seperti penelitian Kimura, penelitian ini menggunakan variabel PDB per kapita untuk menangkap dampak dari tingkat kemajuan ekonomi pada kinerja ekspor. PDB per kapita juga dianggap sebagai proksi untuk menentukan pengaruh faktor *endowment* terhadap fragmentasi (Kimura et al., 2007). GDP per kapita juga merupakan pendekatan tingkat pembangunan ekonomi yang berdampak positif pada perdagangan internasional (Frankel & Rose, 2000; Elliott & Ikemoto, 2004).

FDI digunakan sebab variabel ini mendorong perdagangan dan merangsang pertumbuhan ekonomi (Heo & Kim, 2019). Keterbukaan finansial mampu meningkatkan kinerja ekonomi dengan meningkatkan investasi dari dalam dan luar negeri. Sementara itu, untuk mengukur jarak, digunakan Indeks Kinerja Logistik atau *Logistic Performance Index* (LPI) oleh Bank Dunia (Arvis et al., 2014)

sebagai proksi. Mengingat sifat multidimensi fasilitasi perdagangan, LPI dipilih karena indeks yang paling komprehensif yang mencakup berbagai domain variabel, dan memberikan informasi berharga tentang situasi di setiap negara. LPI menggabungkan langkah kualitatif dan kuantitatif dalam mengevaluasi logistik suatu negara, yang mencakup bidang-bidang seperti efisiensi bea cukai, infrastruktur, kualitas layanan logistik, dan prosedur perbatasan dan ketepatan waktu (Chen & Li, 2018). Kekuatan LPI adalah cakupan yang komprehensif dan validitas, sedangkan kelemahannya adalah bahwa data hanya tersedia untuk sejumlah kecil tahun mulai dari 2007. Menjadi semakin penting untuk mengidentifikasi kekurangan yang ada dalam kinerja logistik yang memengaruhi kapasitas ekspor dan impor, itulah sebabnya langkah-langkah fasilitasi perdagangan menjadi sangat penting (Jane, 2011).

Selanjutnya, untuk bisa menjawab tujuan penelitian ini, digunakan tingkat demokrasi yang umum digunakan dalam data Polity IV. Indeks ini mengukur tingkat perkembangan demokrasi pada skala antara -10 (sangat otokratis) dan 10 (sangat demokratis) berdasarkan pada (1) tingkat pelembagaan rekrutmen eksekutif, (2) daya saing dan keterbukaan rekrutmen eksekutif, (3) tingkat kendala pada otoritas eksekutif, dan (4) regulasi dan daya saing partisipasi politik (Heo & Kim, 2019). Polity IV juga menyediakan data untuk 167 negara dari tahun 1888 hingga tahun 2016 sehingga memberikan pengamatan yang cukup bagi analisis ini.

Variabel *Country_Democ* dimasukkan dalam model untuk melihat perbedaan pengaruh demokrasi terhadap perdagangan berdasarkan pendapatan negara, variabel *dummy Country* akan berinteraksi dengan variabel *Democracy*. Hasil koefisien *Country_Democ* dapat ditafsirkan sebagai efek demokrasi pada perdagangan di negara-negara Asia. Dihipotesiskan demokrasi di negara-negara Asia memengaruhi perdagangan secara negatif. Penelitian tentang pengaruh sistem demokrasi terhadap perdagangan ini, bukan hanya di Indonesia, namun di negara-negara Asia menjadi penting dalam upaya meningkatkan perdagangan Indonesia dengan negara-negara di kawasan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Demokrasi dan Perdagangan

Penelitian Milner & Kubota (2005), menunjukkan bahwa munculnya demokrasi secara positif memengaruhi perdagangan terbuka di negara-negara berkembang. Penelitian ini mendukung Teorema Stolper-Samuelson, yang berpendapat bahwa pekerja yang kurang terampil/tidak terampil cenderung lebih suka *trade openness* yang lebih

besar di negara-negara berkembang dan lebih sedikit *trade openness* di negara-negara maju. Ini karena tenaga kerja berketerampilan rendah adalah faktor berlimpah di negara berkembang dan menjadi faktor langka di negara maju. Teorema Stolper-Samuelson adalah teorema dasar dalam Model Heckscher-Ohlin yang mendeskripsikan hubungan antara harga barang dengan faktor seperti gaji dan pendapatan modal. Studi Milner & Kubota (2005) mendukung pandangan bahwa demokratisasi memiliki pengaruh positif terhadap perdagangan.

O'Rourke & Taylor (2006) mengemukakan bahwa demokratisasi dan tingkat demokrasi yang lebih tinggi memiliki efek positif pada keterbukaan perdagangan yang bergantung pada faktor pendukung, khususnya rasio modal-tenaga kerja, baik di negara maju dan berkembang. Eichengreen & Leblang (2007) juga berhipotesis bahwa demokrasi mendorong keterbukaan perdagangan. Mereka menemukan dukungan statistik yang kuat untuk klaim mereka dalam sampel besar negara-negara maju dan berkembang dari tahun 1870 hingga tahun 2000. Studi Milner & Kubota (2005) turut pula mendukung pandangan bahwa demokratisasi memiliki pengaruh positif terhadap keterbukaan perdagangan. Di negara-negara berkembang, ini menyiratkan bahwa demokratisasi memberikan hak khusus pada tenaga kerja yang kurang terampil dan tidak terampil di sektor informal pedesaan dan perkotaan, yang menurut Teorema Stolper-Samuelson, mendukung keterbukaan perdagangan karena mereka adalah faktor berlimpah yang mendapat keuntungan dari perdagangan.

Sementara itu, Muller (1995) menyatakan hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi dan tingkat demokrasi menunjukkan bahwa perolehan terbesar dalam demokrasi harus terjadi di negara-negara di tingkat pembangunan menengah, karena negara-negara kaya telah mencapai tingkat demokrasi yang tinggi dan diharapkan untuk mempertahankan tingkat demokrasi mereka yang stabil. Dalam penelitiannya, Yu (2010) membuktikan demokratisasi dapat memengaruhi perdagangan dalam berbagai hal. Ditemukan bukti kuat bahwa demokratisasi secara signifikan mendorong perdagangan. Demokratisasi importir menyumbang 4-5 persen dari pertumbuhan perdagangan bilateral dan demokratisasi eksportir menyumbang sekitar 3 persen. Secara keseluruhan, demokratisasi berkontribusi 7-8 persen terhadap pertumbuhan perdagangan bilateral. Secara bersamaan, negara yang sangat demokratis akan menjadi eksportir yang menguntungkan dalam perdagangan internasional karena kualitas produk yang lebih baik dan adanya kepercayaan dalam perdagangan.

Galiani & Torrens (2014) mengembangkan model politik-ekonomi untuk mempelajari peran konflik intra-elit dalam menentukan rezim politik suatu negara, kebijakan perdagangan, serta skema redistribusi pajak. Komponen utama dari model ini adalah kebijakan perdagangan yang ditentukan secara politis dan konflik intra-elit atas kebijakan perdagangan. Penelitian ini menggunakan model ekonomi terbuka yang terdiri dari dua kelompok elit dan satu kelompok non-elit yang harus membuat dua keputusan kolektif: yang pertama mengenai pajak penghasilan, dan yang kedua berkaitan dengan kebijakan perdagangan. Diketahui bahwa perdagangan internasional sangat memengaruhi keberpihakan politik, rezim politik, serta kebijakan perdagangan (Galiani & Torrens, 2014). Hasil menunjukkan bahwa koneksi signifikan ada di antara transisi politik, perubahan kebijakan perdagangan, dan keunggulan komparatif suatu ekonomi. Poin kritisnya adalah bahwa kebijakan perdagangan membuka jalan bagi perpecahan. Faktanya, begitu peneliti memperkenalkan kebijakan perdagangan sebagai hasil endogen dari permainan transisi politik, model memprediksi bahwa dengan tidak adanya konflik intra-elit atas kebijakan perdagangan, perubahan besar dalam rezim politik akan dikaitkan dengan perubahan besar dalam kebijakan perdagangan.

Seperti tujuan dalam penelitian ini, Maulana & Hastiadi (2019) mengeksplorasi pengaruh demokrasi negara-negara anggota ASEAN terhadap perdagangan di ASEAN antara negara-negara ASEAN lainnya dan negara-negara non-ASEAN menggunakan Heckscher-Ohlin Model (H-O-M) dengan Model Gravitasi. Peneliti menggunakan metode data panel dari tahun 2005 hingga tahun 2014, serta skor pemerintahan sebagai proksi untuk demokrasi di negara-negara ASEAN. Hasil dari penelitian ini adalah demokrasi memiliki efek yang berbeda pada perdagangan intra-ASEAN dan perdagangan ekstra-ASEAN. Demokrasi memiliki efek negatif pada perdagangan intra-regional ASEAN, namun memiliki efek positif pada perdagangan ekstra-regional ASEAN. Dari dua hasil ini, ditemukan bahwa demokratisasi negara-negara ASEAN menyebabkan pengalihan perdagangan dari negara ASEAN ke negara non-ASEAN, yang pada akhirnya menyiratkan penurunan integrasi ekonomi regional.

Ada pula yang menganggap demokrasi tidak memiliki dampak bagi perdagangan. Heo et al. (2012) berpendapat bahwa negara-negara berkembang tidak mampu menggunakan demokrasi karena sistemnya tidak efisien bagi ekonomi. Selain itu, kemajuan ekonomi yang tumbuh cepat di bawah pemerintahan otoriter di beberapa negara dianggap

sebagai contoh efektivitas pemerintah otoriter sehubungan dengan kinerja ekonomi. Perdagangan akan tumbuh dalam iklim demokrasi yang benar, yakni mencakup kebebasan, informasi yang bisa diakses secara bebas, dan hak properti yang aman dari kekuasaan negara yang sewenang-wenang. Goodell (1985) berpendapat bahwa pemerintah otokratis menghasilkan kondisi ekonomi yang tidak dapat diprediksi karena tidak ada pemeriksaan pada kemampuan otokrasi untuk mengubah “aturan main” kapan saja. Di bawah kondisi yang tidak dapat diprediksi, pengusaha akan ragu untuk melakukan perdagangan dan berinvestasi (Goodell, 1985).

Lalu, dalam kondisi apa demokrasi berdampak positif, negatif atau netral dalam perdagangan? Menurut Chen & Li (2018), ekonomi yang sangat terbuka untuk perdagangan, seperti Hong Kong dan Singapura, mungkin memiliki volume perdagangan tiga hingga empat kali lebih besar dari PDB. Pada tahun 2012, misalnya, rasio perdagangan/PDB Hong Kong adalah 360,1 dan 400,2 untuk Singapura. Artinya, demokrasi berdampak positif ketika ekonomi sebuah negara lebih terbuka bagi perdagangan, sehingga akan menciptakan lebih banyak peluang ekonomi. Di sisi lain, beberapa penelitian melaporkan hubungan negatif antara globalisasi, liberalisasi perdagangan, dan demokrasi (Li & Reuveny, 2003). Globalisasi menekan otonomi suatu negara karena meningkatnya liberalisasi perdagangan dan pasar keuangan menurunkan tingkat kemampuan negara untuk mengelola ekonomi mereka sendiri (Heo & Kim, 2019). Hal ini menyulitkan pemerintah untuk bertindak demi kepentingan warganya. Misalnya, untuk bertahan hidup dalam ekonomi global yang kompetitif, negara menggunakan kebijakan publik yang menarik bagi investor asing untuk menarik modal asing, meskipun kebijakan ini mungkin tidak memenuhi kepentingan warga negaranya dengan baik. Lingkungan seperti ini merusak gerakan menuju demokrasi (Peck, 2001).

Penelitian Yue & Zhou (2018) memberikan wawasan baru terkait hubungan antara demokrasi dan perdagangan dan melengkapi literatur yang ada tentang efek lembaga otoriter pada perkembangan ekonomi. Menggunakan metode kuantitatif data panel dari 140 negara pada tahun 1962 hingga tahun 2010, ditemukan bahwa rata-rata negara-negara demokratis memiliki keunggulan komparatif dalam mengekspor produk-produk yang berbeda, yang mencerminkan biaya transaksi yang lebih rendah dalam perdagangan dan kompleksitas ekonomi yang lebih tinggi. Ditemukan pula bahwa negara-negara demokratis lebih cenderung menjadi mitra dagang yang lebih dapat dipercaya dan menopang sistem ekonomi yang memunculkan keunggulan komparatif dalam berbagai sektor berbeda. Selain

itu dalam penelitiannya, Cervellati et al. (2018) menemukan bahwa ada interaksi positif yang signifikan antara keterbukaan perdagangan dan demokratisasi, ditambah dengan dinamika teknologi. Zissimos (2017), dalam penelitiannya, mencoba menjelaskan terkait kebijakan perdagangan di bawah rezim kediktatoran dan demokratisasi dengan menggabungkan model perdagangan internasional dan kebijakan perdagangan. Hasil dari penelitiannya antara lain, peristiwa-peristiwa transisi demokrasi benar-benar terjadi karena adanya ancaman revolusi; dan baik sistem kediktatoran maupun demokrasi sama-sama merespons *price shocks* atau naik-turunnya harga.

Deskriptif Statistik

Analisis deskriptif dilakukan untuk menggambarkan distribusi data. Teknik yang digunakan dalam statistik deskriptif pada penelitian ini adalah nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, dan *sum* dari masing-masing variabel (Ghozali, 2011). Variabel yang digunakan, yaitu meliputi variabel GDP_{ppp} , GDP_{total} , FDI, *distance*, populasi, *country*, dan demokrasi. Setelah dilakukan pengujian statistik deskriptif maka diperoleh hasil seperti pada Tabel 1.

Pada Tabel 1, variabel *trade* memiliki nilai terendah sebesar 0,825 dan nilai tertinggi sebesar 1,904; dengan nilai rata-ratanya sebesar 1,438 dan standar deviasinya (tingkat sebaran datanya) sebesar 0,245. Variabel GDP_{ppp} memiliki nilai terendah sebesar 3,101 dan nilai tertinggi sebesar 14,999 dengan nilai rata-ratanya sebesar 13,480 dan tingkat sebaran datanya sebesar 3,259. Variabel GDP_{total} memiliki nilai terendah sebesar 0,608 dan nilai tertinggi sebesar 0,853 dengan nilai rata-ratanya sebesar 0,757 dan tingkat sebaran datanya sebesar 0,057. Variabel FDI memiliki nilai terendah sebesar 4,544 dan nilai tertinggi sebesar 14,512 dengan nilai rata-ratanya sebesar 9,434 dan tingkat sebaran datanya sebesar 2,294. Variabel *distance* memiliki nilai terendah sebesar 1,212 dan nilai tertinggi sebesar 1,283 dengan nilai rata-ratanya sebesar 1,247 dan tingkat sebaran datanya sebesar 0,025. Variabel populasi memiliki nilai terendah sebesar 5,842 dan nilai tertinggi sebesar 9,143 dengan nilai rata-ratanya sebesar 7,580 dan tingkat sebaran datanya sebesar 0,997. Variabel *democracy* memiliki nilai terendah sebesar 0 dan nilai tertinggi sebesar 10 dengan nilai rata-ratanya sebesar 5,563 dan tingkat sebaran datanya sebesar 3,635. Terakhir, variabel *country* dengan *dummy* memiliki nilai terendah sebesar 0 dan nilai tertinggi sebesar 1 dengan nilai rata-ratanya sebesar 0,454 dan tingkat sebaran datanya sebesar 0,499.

Tabel 1. Deskriptif Statistik Variabel yang Digunakan dalam Model

Variabel	Mean	Std. Deviasi	Min.	Max.	Obs.
Trade	1,438	0,245	0,825	1,904	220
GDP _{ppp}	13,480	3,259	3,101	14,999	220
FDI	9,434	2,294	4,544	14,512	220
Distance	1,247	0,025	1,212	1,283	220
Pop	7,580	0,997	5,842	9,143	220
GDP _{total}	0,757	0,057	0,608	0,853	220
Democ	5,563	3,635	0	10	220
Country	0,454	0,499	0	1	220

Sumber: Data diolah.

Hasil Uji Pemilihan Model

Dalam Uji Chow yang dilakukan pada penelitian ini, nilai $\text{prob} > F = 0,000$ di mana nilai ini lebih kecil dari 0,050 sehingga model yang terpilih adalah *fixed effect*. Dalam Uji Hausman, jika $P\text{value} (\text{Prob} > \chi^2) > \text{Alpha}$ 0,050 maka H_0 diterima artinya pilihan terbaik adalah *random effect*. Model *Random Effect* menjadi model yang tepat dalam menjelaskan pada permasalahan penelitian dan disarankan menggunakan Uji *General Least Square* (GLS). Berdasarkan hasil Uji Lagrange, nilai $\text{Prob} > \text{chibar}^2 = 0,000$ di mana nilai ini lebih kecil dari 0,050 sehingga model yang terpilih, yaitu *random effect*. Jadi berdasarkan hasil analisis uji pemilihan model maka model terbaik yang terpilih, yaitu Model *Random Effect*.

Hasil Estimasi

Berdasarkan hasil estimasi, variabel GDP_{ppp}, GDP_{total}, populasi, *distance*, *country*, dan *country_democ* berpengaruh signifikan terhadap perdagangan di 11 negara Asia. Sedangkan variabel FDI dan *democracy* tidak berpengaruh signifikan terhadap perdagangan internasional.

Berdasarkan hasil estimasi, variabel GDP_{ppp}, GDP_{total}, populasi, *distance*, *country*, dan *Country_democ* berpengaruh signifikan terhadap perdagangan di 11 negara Asia. Sedangkan variabel FDI dan *Democ* tidak berpengaruh signifikan terhadap perdagangan. Variabel interaksi *Country_democ* berpengaruh signifikan terhadap perdagangan karena nilai $p > |z| = 0,019$, di mana nilai ini lebih kecil dari 0,050. GDP_{ppp} signifikan memengaruhi perdagangan dengan nilai $p > |z| = 0,001$, di mana nilai ini lebih kecil dari 0,050. Variabel *Democracy* tidak berpengaruh signifikan terhadap perdagangan dengan nilai $p > |z| = 0,643$, di mana nilai ini lebih besar dari 0,050. Variabel *Country* berpengaruh signifikan terhadap perdagangan dengan nilai $p > |z| = 0,001$, di mana nilai ini lebih kecil dari 0,050. Variabel GDP_{ppp} berpengaruh signifikan terhadap perdagangan dengan nilai $p > |z| = 0,001$, di mana nilai ini lebih kecil

dari 0,050. Variabel GDP_{total} signifikan memengaruhi perdagangan dengan nilai $p > |z| = 0,000$, di mana nilai ini lebih kecil dari 0,050. Variabel LPI atau jarak berpengaruh signifikan terhadap perdagangan dengan nilai $p > |z| = 0,035$, di mana nilai ini lebih kecil dari 0,050. Variabel populasi berpengaruh signifikan terhadap perdagangan dengan nilai $p > |z| = 0,020$, di mana nilai ini lebih kecil dari 0,050. Yang terakhir, variabel FDI tidak berpengaruh signifikan terhadap perdagangan dengan nilai $p > |z| = 0,688$, di mana nilai ini lebih besar dari 0,050.

Variabel demokrasi tidak berpengaruh signifikan terhadap perdagangan. Namun, variabel interaksi *Country_democ* berpengaruh terhadap perdagangan. Namun, koefisien variabel interaksi *Country_democ* menunjukkan tanda negatif, yakni -0,008, artinya semakin tinggi demokrasi pada suatu negara maka semakin tidak memiliki pengaruh terhadap perdagangan. Penelitian Milner & Kubota (2005), menunjukkan bahwa munculnya demokrasi secara positif memengaruhi perdagangan terbuka di negara-negara berkembang. Penelitian ini mendukung Teorema Stolper-Samuelson, yang berpendapat bahwa pekerja yang kurang terampil/tidak terampil cenderung lebih suka *trade openness* yang lebih besar di negara-negara berkembang dan lebih sedikit *trade openness* di negara-negara maju. Ini karena

Tabel 2. Hasil Estimasi Pengaruh Demokrasi terhadap Perdagangan di 11 Negara Asia

Variabel	Koefisien	P-value
<i>Country_democ</i>	-0,008	0,019
<i>Democracy</i>	-0,000	0,643
<i>Country</i>	0,114	0,001
GDP _{ppp}	0,011	0,001
GDP _{total}	4,315	0,000
LPI	0,926	0,035
Populasi	-0,051	0,020
FDI	-0,000	0,688

Sumber: Data diolah.

tenaga kerja berketerampilan rendah adalah faktor berlimpah di negara berkembang dan menjadi faktor langka di negara maju. Teorema Stolper-Samuelson adalah teorema dasar dalam Model Heckscher-Ohlin yang mendeskripsikan hubungan antara harga barang dengan faktor, seperti gaji dan pendapatan modal.

Lalu, mengapa variabel demokrasi tidak berpengaruh dalam perdagangan? Dalam penelitian Weede (1983), demokrasi memiliki dampak negatif pada kemajuan ekonomi, terutama di negara-negara yang kurang berkembang. Weede (1983) menggunakan regresi yang didasarkan pada sekitar 90 negara dalam periode tahun 1960 hingga tahun 1979 dengan variabel kontrol, mencakup antara lain *Gross National Product* (GNP) per kapita, investasi domestik bruto, rasio pendaftaran sekolah, dan rasio partisipasi militer. Selanjutnya, dampak negatif demokrasi tersebut ternyata berbeda ketika analisisnya dibatasi hanya untuk *Least Developed Countries* (LDCs). Di sisi lain, dampak demokrasi tersebut cukup kuat terhadap kemajuan ekonomi di negara-negara di mana pemerintahannya memiliki pendapatan tinggi. Oleh sebab itu, bukan demokrasi yang merusak prospek kemajuan sebuah negara, namun ternyata dari kombinasi antara demokrasi dan campur tangan negara yang kuat terhadap perekonomian.

Dalam hasil estimasi, GDP_{ppp} dan GDP_{total} berpengaruh terhadap perdagangan. Seperti yang diketahui, tingkat pendapatan nasional sebuah negara bisa didorong oleh faktor ekspor dan impor. Variabel populasi berpengaruh signifikan terhadap perdagangan. Populasi harus menjadi salah satu faktor penentu perdagangan dalam sebuah negara. Semakin banyak orang berada dalam sebuah negara, semakin besar peluang untuk perdagangan domestik dan untuk menghindari biaya perdagangan di luar negeri (Mélitz, 2007). Helliwell & Verdier (2001) mengembangkan ukuran jarak internal yang sangat canggih yang memperhitungkan distribusi spasial populasi di sebuah negara. Populasi juga digunakan untuk mengukur besarnya negara. Populasi memiliki dua peran, yaitu dari segi permintaan dan dari segi penawaran. Dari segi permintaan, populasi bertindak sebagai konsumen, sedangkan dari segi penawaran populasi bertindak sebagai produsen (Irawan & Suparmoko, 2002). Dengan demikian populasi bisa berperan untuk meningkatkan ekspor dan juga bisa berperan sebagai meningkatkan impor. Ketika populasi mengalami kenaikan, maka nilai impor negara-negara juga akan naik. Begitu pula sebaliknya, jika populasi mengalami penurunan, maka nilai impor negara-negara juga akan turun.

Variabel *distance* berpengaruh terhadap perdagangan. Hal ini membuktikan bahwa jarak memengaruhi perdagangan internasional. Perbedaan

antara dua besaran harga mencerminkan jarak dari negara pengekspor ke negara pengimpor dan kebijakan terhadap perdagangan dan transportasi (Sun, 1999). Menurut Mélitz (2007), pentingnya jarak dalam menjelaskan perdagangan bilateral mungkin merupakan keberhasilan yang paling luar biasa dari Model Gravitasi atau *Gravity Model*. Efek negatif jarak pada perdagangan bersifat intuitif: menghasilkan biaya transportasi. Dalam perdagangan, secara independen, jarak khusus antar negara-jarak bilateral memiliki efek besar pada perdagangan bilateral dan harus selalu dikontrol. Jarak ekonomi suatu negara dengan negara lain memang menjadi suatu halangan dalam perdagangan. Namun, menurut beberapa penelitian sebelumnya, jarak berpengaruh signifikan terhadap aliran perdagangan ekspor. Menurut Hendria et al. (2017) seiring kemajuan teknologi dan transportasi, maka jarak ekonomi seharusnya memiliki nilai signifikan yang makin rendah. Di lain pihak, jarak akan signifikan jika produk yang dikirim memiliki keterbatasan dalam waktu atau memiliki tanggal kadaluarsa seperti makanan dan minuman. Namun untuk produk pakaian jadi yang tidak ada kadaluarsa, maka jarak ekonomi memiliki pengaruh yang tidak signifikan.

Sedangkan, variabel FDI tidak berpengaruh terhadap perdagangan. Salah satu keuntungan dari *open trade* adalah membuka peluang bagi FDI menjadi salah satu pendorong pembangunan ekonomi. Di samping itu, FDI juga bisa menjadi *trigger* dalam *technology spillovers*, membantu pembentukan modal manusia, berkontribusi untuk mengintegrasikan perdagangan internasional, membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kompetitif, serta meningkatkan pengembangan usaha. Adapun selain hanya untuk keuntungan ekonomi, FDI juga bisa membantu memperbaiki kerusakan lingkungan dan kondisi sosial pada negara yang bersangkutan. Banyak hasil studi yang menyimpulkan bahwa FDI berkontribusi bagi faktor produksi dan pertumbuhan pendapatan sebuah negara, melebihi dorongan dari investasi domestik. Namun, beberapa manfaat ini tidak berpengaruh terhadap perdagangan.

KESIMPULAN

Hasil pengujian dengan regresi panel menunjukkan bahwa *Random Effect Model* sebagai model terbaik untuk melihat hubungan antar variabel GDP_{ppp} , GDP_{total} , FDI, populasi, *distance*, dan demokrasi, baik untuk analisis di negara berpendapatan menengah maupun di negara berpendapatan tinggi di Asia. Hasil penelitian menyimpulkan demokrasi, sebagai variabel utama yang dikaji dalam penelitian ini, tidak signifikan memengaruhi perdagangan. Walaupun dianggap

aspek penting, namun demokrasi tidak berpengaruh nyata terhadap perkembangan perdagangan di negara berpendapatan tinggi maupun rendah. Hal ini disebabkan ekonomi dan proses demokratisasi di beberapa negara dengan pendapatan rendah dan pendapatan tinggi berbeda. Di negara pendapatan menengah, demokrasi berpengaruh terhadap perdagangan, sedangkan di negara berpendapatan tinggi, demokrasi tidak berpengaruh terhadap perdagangan.

GDP atau PDB sebagai variabel makroekonomi memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap perdagangan di 11 negara Asia. FDI tidak berpengaruh terhadap perdagangan. Artinya, FDI menjadi salah satu pendorong ekonomi tidak memiliki dampak terhadap perdagangan. Populasi merupakan variabel makroekonomi yang memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap perdagangan. Hal ini menunjukkan, ketika populasi mengalami kenaikan, maka perdagangan baik di negara berpendapatan menengah maupun tinggi di Asia juga akan meningkat. Jarak juga berpengaruh terhadap perdagangan. Hasil uji statistik yang signifikan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa jarak ekonomi sangat penting dalam perdagangan di negara berpendapatan menengah maupun tinggi di Asia.

Berdasarkan hasil kesimpulan dapat disarankan untuk negara yang berpendapatan menengah yang sudah menerapkan sistem demokrasi, seperti Indonesia, Filipina, India, dan Pakistan perlu mengontrol pertumbuhan penduduk. Sebab angka pertumbuhan penduduk berpengaruh terhadap perdagangan. Negara berkembang dengan sistem demokrasi juga harus mempertahankan *trade openness* demi memajukan ekonomi. Tanpa perdagangan bebas, negara berkembang akan sulit melakukan ekspor-impor untuk memenuhi kebutuhan warga negara. Sedangkan untuk negara berpendapatan menengah yang tidak menerapkan demokrasi, seperti Tiongkok dan Thailand, maka kebijakan harus berpihak pada kesejahteraan negara itu sendiri dengan mendongkrak sektor-sektor dalam negeri dan mengembangkan inovasi-inovasi yang tidak dimiliki negara lain.

Untuk negara berpendapatan tinggi yang sudah menerapkan sistem demokrasi, seperti Jepang dan Korea Selatan, disarankan untuk mempertahankan tingkat demokrasi dan sistem politik yang telah stabil. Sedangkan bagi Singapura dan Brunei Darussalam dengan tingkat demokrasi rendah, tanpa adanya demokrasi, perdagangan tetap maju sehingga yang perlu dilakukan adalah mempertahankan kestabilan ekonomi dengan kebijakan politik yang sudah diberlakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aghion, P., Alesina, A., & Trebbi, F. (2008). *Democracy, technology, and growth*. Cambridge: Harvard University Press.
- Arvis, Jean-Francois., Saslavsky, D., Ojala, L., Shepherd, Ben., Busch, C., & Raj, A. (2014). *Connecting to compete 2014: Trade logistics in the global economy-The Logistics. Performance Index and its indicators*. Washington DC: The World Bank.
- Barro, R.J. (1996). *Determinants of economic growth: A cross-country empirical study, Cambridge: MIT Press Books, Edition 1, Volume 1*. Cambridge: MIT Press.
- Basri, F., Wee, T.K., Risza, H., Prasetyantoko, A., Tjandraningsih, I., & Hikmat, B. (2013). *Menemukan konsensus kebangsaan baru: Negara, pasar, dan cita-cita keadilan*. Jakarta: Pusat Studi Agama & Demokrasi (PUSAD) Yayasan Wakaf Paramadina.
- Budiman, A. (2006). *Kebebasan, negara, pembangunan: Kumpulan tulisan 1965-2005*. Jakarta: Pustaka Alfabet dan Freedom Institute.
- Friedman, T.L. (1999). *The Lexus and the Olive Tree: Understanding globalization*. New York: Anchor Books-Random House.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS 19*. Edisi Kelima. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Head, K., & Mayer, T. (2014). Gravity Equations: Workhorse, toolkit, and cookbook. In Gita G., Elhanan H., & Kenneth R. (eds.). *Handbook of international economics*. Volume 4 (131-195). Oxford: Elsevier and Book Aid International.
- Irawan, & Suparmoko, M. (2002). *Ekonomika pembangunan*. Edisi ke-6. Yogyakarta: BPFYogyakarta.
- Krugman, P.R., & Obstfeld, M. (2009). *International economics: Theory and policy*. Eight Edition. Boston: Addison-Wesley.
- Marijan, K. (2010). *Sistem politik Indonesia: Konsolidasi demokrasi pasca orde baru*. Jakarta: Kencana.
- Przeworski, A., Alvarez, M.E., Cheibub, J.A., & Limongi, F. (2000). *Democracy and development: Political institutions and well-being in the world, 1950-1990*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Rueschemeyer, D., Stephens, E.H., & Stephens, J.D. (1992). *Capitalist development and democracy*. Volume 14. Chicago: University of Chicago Press.
- Jurnal dan Working Paper**
- Acemoglu, D., Naidu, S., Restrepo, P., & Robinson, J.A. (2019). Democracy does cause growth? *Journal of Political Economy*, 127(1), 47-100.
- Anderson, J E., & Wincoop, E. van. (2003). Gravity with gravitas: A solution to the border. *American Economic Review*, 93(1), 170-192.
- Balamatsias, P. (2018). Democracy and taxation. *Economics: The Open- Access, Open-Assessment E-Journal*, 12: 1–28.
- Cervellati, M., Naghavi, A., & Toubal, F. (2018). Trade liberalization, democratization and technology adoption. *Journal of Economic Growth*, 23, 145-173.
- Chen, C. & Li, A.X. (2018). Does democracy cause trade policy liberalisation? Unpacking the black box of trade policy. *Journal of International Relations and Development*, 21(4), 1014-1037.
- Eichengreen, B., & Leblang, D. (2007). Democracy and globalization. *Economics & Politics*, 20(3), 289-334.
- Elliott, R.J.R., & Ikemoto, K. (2004). AFTA and the Asian crisis: Help or hindrance to ASEAN intra-regional trade? *Asian Economic Journal*, 18(1), 1-23.
- Fakhrudin, U., & Hastiadi, F.F. (2016). Impact analysis of normalized revealed comparative advantage on ASEAN's non-oil and gas export pattern using Gravity-Model approach. *Working Paper in Economics and Business*, 5(3), 1-25.
- Frankel, J.A. & Rose, A.K. (2000). Estimating the effects of currency unions on trade and output. *National Bureau of Economic Research Working Paper No. 7857*.
- Galiani, S., & Torrens, G. (2014). Autocracy, democracy and trade policy. *Journal of International Economics*, 93(1), 173-193.
- Goodell, G. (1985). The importance of political participation for sustained capitalist development. *Archives Europeennes de Sociologie*, 26(1), 93-127.
- Hadiz, V.R., & Robison, R. (2013). The political economy of oligarchy and the reorganization of power in Indonesia. *Indonesia*, 96, 35-58.
- Hairi, M.I.A. (2016). Sistem Pemerintahan Soft-Authoritarian Singapura di tengah arus demokrasi. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 1(2), 1-5.
- Helliwell, J.F. & Verdier, G. (2001). Measuring internal trade distances: a new method applied to estimate provincial border effects in Canada. *Canadian Journal of Economics*, 34(4), 1024-1041.
- Hendria, M. Oktaviani, R., & Sartono, B. (2017). Faktor yang mempengaruhi aliran perdagangan pakaian jadi Indonesia dengan rentang waktu penelitian tahun 2001-2016 (*Factors that affect the flow of Indonesian apparel trade in the period of research on 2001-2016*). *Arena Tekstil*, 32(2), 77-86.
- Heo, U., Hahm, S.D., & Kim, D. (2012). The impact of democratization on economic growth in Asia: An interrupted time-series analysis. *Korea Observer*, 43(1), 21-45.
- Heo, U., & Kim, H. (2019). Economic globalization and democratic development in East Asia: The indirect link. *Journal of Asian and African Studies*, 54(2), 248-266.
- Jacks, D.S., Meissner, C.M., & Novy, D. (2008). Trade costs, 1870-2000. *American Economic Review: Papers & Proceedings*, 98(2), 529-534.
- Jacks, D.S, Meissner, C.M, & Novy, D. (2011). Trade booms, trade busts, and trade cost. *Journal of International Economics*, 83, 185-201.
- Jane, Chin-Chia. (2011). Performance evaluation of logistics systems under cost and reliability considerations. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, 47(2), 130-137.
- Kimura, F., Takahashi, Y., & Hayakawa, K. (2007). Fragmentation and parts and components trade: Comparison between East Asia and Europe. *The North American Journal of Economics and Finance*, 18(1), 23-40.
- Kono, D.Y. (2006). Optimal obfuscation: Democracy and trade policy transparency. *American Political Science Review*, 100(3), 369-384.
- Kurzman, C., Werum, R., & Burkhart, R.E. (2002). Democracy's effect on economic growth: A pooled time-series analysis, 1951-1980. *Studies in Comparative International Development*, 37, 3-33.

- Leal-Arcas, R. (2011). China's economic rise and regional trade. *APEC and the Rise of China, World Scientific*, 93-120.
- Li, Q., & Reuveny, R. (2003). Economic globalization and democracy: An empirical analysis. *British Journal of Political Science*, 33(1), 29-54.
- Lipset, S.M. (1959). Some social requisites of democracy: Economic development and political legitimacy. *The American Political Science Review*, 53(1), 69-105.
- Maulana, F., & Hastiadi, F.F. (2019). Does democracy cause regional disintegration? The effect of democracy on ASEAN intra-regional and extra-regional trade. *Journal of Economic Cooperation and Development*, 37-55.
- Méltz, J. (2007). North, South and distance in the Gravity Model. *European Economic Review*, 51, 971-991.
- Milner, H.V., & Kubota, K. (2005). Why the move to free trade? Democracy and trade policy in the developing countries. *International Organization*, 59(1), 107-143.
- Milner, H.V., & Mukherjee, B. (2009). Democratization and economic globalization. *The Annual Review of Political Science*, 12(1), 163-181.
- Mukherjee, B., Smith, D., & Li Q. (2009). Labor (im) mobility and the politics of trade protection in majoritarian democracies. *The Journal of Politics*, 71(1), 291-308.
- Muller, E.N. (1995). Economic determinants of democracy. *American Sociological Review*, 60(6), 966-982.
- O'Rourke K., & Taylor, A.M (2006). Democracy and protectionism. *National Bureau of Economic Research Working Paper No. 12250*.
- Peck, J. (2001). Neoliberalizing states: Thin policies/hard outcome. *Progress in Human Geography*, 25(3), 445-455.
- Polterovich, V., & Popov, V. (2010). Democratization, quality of institutions and economic growth. *MPRA Paper No. 19152*.
- Puspa, Y.A. (2019). Gaya kepemimpinan otoriter dan demokratis: Berhasil membawa kesejahteraan masyarakat (Studi kasus kepemimpinan Lee Kuan Yew di Negara Singapura). *Working Paper Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya*.
- Rivera-Batiz. (2000). Democracy, governance, and economic growth: Theory and Evidence. *Review of Development Economics Journal*, 6(2), 225-247.
- Rodrik, D. (1999). Where did all the growth go? External shocks, social conflict, and growth collapses. *Journal of Economic Growth*, 4(4), 385-412.
- Stepan, A., & Linz, J.J. (2013). Democratization theory and the "Arab Spring". *Journal of Democracy*, 24(2), 16-30.
- Sun, H. (1999). Impact of FDI on the foreign trade of China. *Journal of the Asia Pacific Economy*, 4(2), 317-339.
- Suryanta, B. (2012). Aplikasi rejim persamaan Model Gravitasi yang telah dirubah pada kasus dinamika arus perdagangan Indonesia dengan mitra dagang dari ASEAN. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 15(2), 57-76.
- Weede, E. (1983). The impact of democracy on economic growth: Some evidence from cross-national analysis. *Kyklos, International Review for Social Sciences*, 36(1), 21-39.
- Yu, M. (2010). Trade, democracy, and the gravity equation. *Journal of Development Economics*, 91(2), 289-300.
- Yue, J., & Zhou, S. (2018). Democracy's comparative advantage: Evidence from aggregated trade data, 1962–2010. *World Development*, 111, 27-40.
- Zissimos, B. (2017). A theory of trade policy under dictatorship and democratization. *Journal of International Economics*, 109, 85-101.

Disertasi

- Bussmann, M. (2001). Examining causality among militarized interstate disputes, regime type, trade openness, and economic growth. *PhD dissertation*, Tuscaloosa: University of Alabama.